KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

CXXMKEL3

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 H.2					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 NPWP : 8 5 2 6 4 8 1 9 5 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : RADEN RORO RANI MEITA PRATIWI SUBAGYONO									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
4 21-402-01			3.000.000	3.000.000	0	5	150.000		
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022									
Nama Dokum			ımen	en Biaya Pembayaran Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor : Tanggal								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C IDENTITAC DEMOTONO DA IAK									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK C.1 NPWP Instansi Pemerintah 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
-··· L				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	<u>-</u>		2 6	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5	<u></u>								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Denga				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajał ukan tanda tangan.	s mengatur bahwa s	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	